

**STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
DAN KINERJA GURU SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA
MENUNJANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (Studi
Kasus pada Area Garapan Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional
kecamatan Tejakula
kabupaten Buleleng – Bali)**

oleh
Wayan Lasmawan
J u r u s a n P P K N
Fakultas IPS, Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memformulasikan strategi peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru sekolah dasar di kecamatan Tejakula. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Keseluruhan data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Temuan penelitian menunjuk-kan, bahwa (1) kepala cabang dinas pendidikan kecamatan Tejakula telah memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang strategi peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru dalam penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi, (2) para kepala sekolah dasar telah melakukan seperangkat upaya untuk meningkatkan kinerja guru di sekolahnya, (3) masalah utama pendidikan di kecamatan Tejakula adalah kurangnya fasilitas pembelajaran di setiap sekolah, dan (4) kinerja guru sekolah dasar di kecamatan Tejakula telah cukup baik dalam menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Kata kunci : strategi, mutu pendidikan, kinerja guru

ABSTRACT

The aims of this research is to identify and formulate the education quality and elementary teacher's performance strategies at Tejakula district. This research used qualitative design. The data was collected by interview and documentation studies. All of the data was analyzed through descriptive-qualitative method. The finding of the research showed : (1) the local education authority in Tejakula district did enough orientation and provide knowledge about strategy to improve education quality in the application of curriculum base competency, (2) most of elementary school was done a strategy to increase of his teacher's, (3) the problems focus of education in Tejakula district is the facilities of education practice a minimize, and (4) elementary teacher performance on applied of curriculum based competency at Tejakula district was enough.

Key words : strategy, education quality, and teacher performance

1. Pendahuluan

Riak dan desah nafas masyarakat senantiasa menghadirkan nuansa tersendiri bagi insan-insan yang hidup di dalamnya. Lembaga pendidikan merupakan satu di antara banyak institusi yang ada di masyarakat dan difungsikan bagi kesejahteraan umat manusia. Memasuki milenium ketiga, lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan yang sangat berat, terkait dengan peningkatan mutu dan relevansinya. Paradigma berpikir para pelaku pendidikan tampaknya mulai bergeser secara vertikal dalam basis paedagogis, seiring dengan pemberian otonomi pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota sebagai implikasi langsung dari pemberlakuan azas desentralisasi. Masalah pendidikan di Indonesia yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, banyak berkaitan dengan mutu pendidikan baik dalam dimensi proses maupun hasilnya. Masalah ini semakin dirasakan sebagai krisis pendidikan yang meresahkan, karena banyak pendekatan pembangunan pendidikan hanya memfokuskan pada masalah kuantitas, sehingga usaha mencerdaskan kehidupan bangsa cenderung dipersempit dalam lingkup pendidikan formal dan pembelajaran yang terbatas pada perhitungan kuantifikasi dengan mengabaikan kualitas. Walaupun sekarang ini telah dilancarkan pengembangan model pilar pembangunan pendidikan yang menyangkut pemerataan akses, kualitas, produktivitas dan relevansi, namun masalah pendidikan terus berkembang makin rumit dan terbelenggu dalam sistem yang tengah terstruktur.

Membicarakan masalah mutu pendidikan ternyata amat pelik, karena menyangkut berbagai aspek, orientasi, pendekatan, strategi, serta kriteria dan kepentingan yang berkait dengan penilaian mutu tersebut. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal dan media pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), juga dihadapkan pada tantangan untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat modern. Kondisi ini merupakan tantangan dan masalah yang sangat serius bila dikaitkan dengan pemberlakuan otonomi pendidikan (desentralisasi pendidikan) dan

pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Terkait dengan hal tersebut, maka upaya peningkatan kinerja para praktisi pendidikan sangat dibutuhkan.

Berdasarkan wacana dan realitas menyangkut kualitas pendidikan nasional dan profesionalisme pelaku pendidikan di atas, penelitian ini akan diarahkan pada pengkajian dan memformulasikan strategi peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru dalam rangka pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan otonomi pendidikan. Rasional dari penentuan fokus penelitian di atas, lebih didasari oleh pemikiran ilmiah, bahwa kalangan birokrat pendidikan dan kinerja sumber daya manusianya sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan tersebut. Ada sejumlah area kajian dan sentra permasalahan yang terakumulasi dalam pengelolaan pendidikan dan pelaku pendidikan, mulai dari kelengkapan dokumen formal yang mewadahi pemberlakuan otonomi pendidikan, kualitas sumber daya pendidikan, implikasi Kurikulum (KBK) terhadap pengelolaan pendidikan pada level sekolah, satuan gugus manajemen, kewenangan kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, dan standar Kompetensi minimal pelaku pendidikan yang disepakati (Puskur, 2004).

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional di setiap kecamatan, memiliki peran dan kewenangan yang sangat esensial dalam kaitannya dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru (Lasmawan, 2003). Sementara *National Commission for the Social Studies* (NCSS, 2003) menyatakan bahwa, kinerja para pelaku pendidikan di kawasan Asia – Afrika, khususnya pada negara-negara berkembang masih sangat bergantung pada kebijakan atau pola manajemen, sehingga parameter evaluasinya masih cenderung subjektif. Mengacu pada beberapa fakta dan kajian tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada upaya pengkajian dan indentifikasi peran serta strategi yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional kecamatan, khususnya untuk kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru menyongsong pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan penerapan otonomi pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimana profil pengelolaan pendidikan yang telah dilakukan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional kecamatan Tejakula ?, (2) Bagaimana peranan dan kewenangan kepala sekolah ?, bagaimana pendapat guru ?, dan (3) Kendala apa saja yang dihadapi oleh ketiga komponen tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru dalam pemberlakuan KBK ?. Latar sosial dari penelitian ini adalah wilayah garapan Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikemas dalam format studi kasus. Lokasi penelitian adalah di kecamatan Tejakula kabupaten Buleleng. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan dikembangkan lebih

jauh dengan teknik *snowball sampling*. Sampel penelitian terdiri dari: kepala cabang dinas pendidikan kecamatan Tejakula, kepala sekolah, dan guru sekolah dasar. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan: pedoman wawancara, kuesioner, dan studi dokumen. Keseluruhan data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang dipadukan dengan teknik lintas situs, sehingga pemaknaan terhadap keseluruhan temuan penelitian dapat dikontrol dan *bias* data dapat ditekan sedemikian rupa. Adapun mekanisme analisis yang digunakan adalah: pengumpulan data, kodifikasi dan kategorisasi data, *display* dan pemaknaan data, perumusan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian secara berulang sampai tercapainya kejenuhan data (Dooley, 2002).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, diperoleh sejumlah data yang bertalian dengan strategi peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru di kecamatan Tejakula – Buleleng. Untuk itu, secara runtun berikut akan dideskripsikan temuan-temuan penelitian yang secara logika merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

3.1.1 Profil Pengelolaan Pendidikan pada Cabang Dinas kecamatan Tejakula

Berdasarkan data yang diperoleh saat dilakukan penjarangan data, tampak bahwa pengelolaan pendidikan pada area bidang garapan Cabang Dinas Kecamatan Tejakula masih sangat kental dengan warna dan pola perilaku administrator tradisional yang bersifat sentralistik. Kepala cabang dinas dan jajarannya masih “asyik” dengan pola dan sistem yang sama, ketika sistem sentralistik masih diberlakukan di dalam sistem pendidikan nasional. Kalangan staf (pegawai, pengawas, dan tim evaluasi) masih banyak yang berpola pikir sentralistik, walaupun pada dasarnya secara substansial pola yang demikian harus sesegera mungkin digeser menuju pengelolaan pendidikan yang otonom dan beragam dalam kesatuan sistem, yaitu sistem pendidikan nasional.

Kalangan staf pendidikan di tingkat kecamatan Tejakula, masih menerapkan berbagai langkah yang berbau sentralistik, dengan mengabaikan eksistensi dan keotonoman sekolah maupun guru. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan atau koordinasi tugas antara Cabang Dinas dengan sekolah maupun guru. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan Kurikulum pada level sekolah lebih banyak diposisikan sebagai objek dan pelaku kebijakan dari pejabat di atasnya. “Ruang gerak” guru sedikit terbatas dengan pola manajemen dan pengelolaan yang seperti itu. Pada suatu ketika, simpati dari kalangan guru terhadap sanksi yang diperoleh rekannya pada suatu kesempatan tertentu akan melahirkan protes dan cibiran baik langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan kebijakan “penderahan” pengelolaan pendidikan, tampak bahwa

kalangan pejabat di daerah sudah mulai berpikir dan merancang kinerja sistem yang sejalan dengan semangat otonomi. Persoalannya adalah bahwa, untuk mengubah sikap dan *beliefs* (keyakinan) para birokrat dan administrator tersebut diperlukan waktu yang relatif lama. Dilihat dari dimensi wawasan dan pemahaman mereka terhadap inovasi pendidikan nasional, khususnya menyangkut pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), ternyata mereka (staf Cabang Dinas, penilik, dan kepala sekolah) baru memiliki pemahaman tentang hal tersebut pada taraf “cukup memadai”. Pemahaman ini mereka peroleh dari mengikuti penataran ataupun lokakarya yang dilaksanakan secara terprogram dan terjadwal oleh pejabat atau birokrasi di atasnya. Secara keseluruhan, tampak bahwa profil kinerja dari para pejabat pendidikan (penilik dan kepala sekolah) di kecamatan Tejakula sudah mengacu pada adanya upaya memahami struktur kerja dan inovasi di bidang kerjanya, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan di segala lini.

3.1.2 Peranan dan Kewenangan Kepala Sekolah sebagai Administrator Pendidikan

Seiring dengan perjalanan waktu sosialisasi inovasi pendidikan nasional, kalangan kepala sekolah dasar di kecamatan Tejakula juga telah melakukan pembenahan sektor internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan mereka dalam berbagai penataran dan pelatihan tentang administrasi KBK dan strategi pengembangannya. Kegiatan tersebut dilakukan disebabkan karena mereka menyadari, bahwa sebagai administrator pendidikan, harus memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai bertalian dengan bidang tugas dan inovasi dalam bidang tersebut. Secara eksternal, ternyata para kepala sekolah ini telah menjalin kerjasama secara berkelanjutan dalam wadah ikatan kepala sekolah yang dikenal dengan nama kelompok kerja kepala sekolah (K3S). Ikatan ini dibentuk secara formal oleh para kepala sekolah di bawah koordinasi dan fasilitasi instansi kerjanya masing-masing.

Kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai administrator pendidikan, telah melakukan sejumlah kebijakan internal di sekolahnya masing-masing, bertalian dengan pemberlakuan KBK. Mereka telah mengirimkan para guru untuk mengikuti berbagai program peningkatan kemampuan dan keterampilan instruksional dalam rangka pemberlakuan KBK. Di sisi lain, kepala sekolah juga telah melakukan koordinasi ke dalam, dengan menunjuk salah satu guru sebagai koordinator kerja guru untuk kepentingan pelaksanaan KBK. Secara periodik, para kepala sekolah ini telah melakukan upaya pembinaan dan pengarahan terkait dengan kinerja para guru di sekolahnya. Di sisi lain, sekolah bekerjasama dengan Komite Sekolah telah menyediakan anggaran khusus untuk alokasi peningkatan kinerja guru (dengan mengirim para guru mengikuti penataran maupun pelatihan tentang KBK di luar program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan), sebagai antisipasi peningkatan kinerja guru dalam pemberlakuan KBK. Berbagai kebijakan ini, pada dasarnya sangat

dimungkinkan sejalan dengan pemberlakuan manajemen Berbasis sekolah (MBS), yakni sekolah memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan menentukan arah kebijakan pengembangan sekolahnya sesuai dengan standar mutu pendidikan yang telah ditetapkan secara nasional. Jika disimpulkan tentang peranan dan kewenangan yang harus “dimainkan” oleh kepala sekolah sebagaimana yang tercantor di atas, tampak bahwa hal itu akan berpengaruh secara langsung terhadap upaya peningkatan kinerja guru dan pencapaian standar mutu pendidikan nasional dalam rangka pemberlakuan KBK saat ini.

3.1.3 Pendapat Guru SD terhadap Kebijakan Kepala Kantor Cabang Dinas

Berdasarkan hasil wawancara terhadap responden (guru) bertalian dengan kinerja kepala cabang dinas pendidikan kecamatan Tejakula, diperoleh informasi bahwa: (1) Kepala Cabang Dinas telah melakukan berbagai upaya yang terprogram dan terjadwal dalam kaitannya dengan pengkoordinasian tugas dan kewajiban staf di bawahnya, (2) Kepala Cabang Dinas telah melakukan upaya-upaya secara terstruktur dalam mempersiapkan kalangan guru agar dapat menerapkan KBK dengan baik, (3) Kepala Cabang Dinas memberikan keleluasaan yang optimal kepada guru untuk mengembangkan diri dan profesinya, (4) Kepala Cabang Dinas memberikan kesempatan yang sama kepada para guru untuk mengikuti berbagai *in-service training* yang diselenggarakan oleh lembaga atau pun badan di luar institusi Dinas Pendidikan kabupaten, (5) Kepala Cabang Dinas cukup mampu menyuarakan aspirasi kalangan guru, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan guru, (6) Kepala Cabang Dinas tegas dalam menyikapi dan memutuskan berbagai persoalan pendidikan, sehingga patut diteladani oleh bawahannya, dan (7) Kepala Cabang Dinas memiliki sikap dan pola pikir antisipatif yang teruji dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan tanggungjawab tugasnya.

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa di mata guru yang merupakan bawahannya, Kepala Cabang Dinas pendidikan kecamatan Tejakula telah mampu memerankan dirinya sebagai administrator dan birokrator pendidikan yang layak dan memadai dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru dalam pelaksanaan KBK sebagai bentuk dari inovasi pendidikan nasional. Guru merasa nyaman dan tidak tertekan dalam melaksanakan tugas, dikarenakan oleh sikap dan kebijakan atasannya yang demokratis dan humanis. Pola dan iklim kerja yang demikian, memungkinkan kalangan guru untuk berkreasi dan berimprovisasi dalam meningkatkan pencapaian tugas-tugas instruksionalnya. Bilamana tugas dan kesempatan pengembangan profesi telah dilakukan dengan maksimal, maka kondisi ini secara signifikan akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

3.1.4 Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara terstruktur terhadap kinerja dan iklim kerja Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tejakula, diperoleh data bahwa ternyata kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki. Kendala lainnya yang dihadapi dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi dan pemberlakuan KBK adalah belum mapannya Komite Sekolah sebagai patner kerja pendidikan. Di beberapa sekolah telah terbentuk Komite Sekolah, namun kinerja dan kepeduliannya terhadap pendidikan masih sangat kurang. Kendala lainnya yang dihadapi adalah belum mapannya pengetahuan dan keterampilan birokrasi kalangan pengawas dan kepala sekolah sebagai administrator pendidikan di bawah Kepala Cabang Dinas. Hal ini sering menimbulkan benturan-benturan dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin mereka. Berdasarkan data di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa secara administratif Cabang Dinas tidak mengalami kendala dalam melaksanakan tugasnya. Namun dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana dalam memberlakukan KBK dan otonomi pendidikan, tampak bahwa Cabang Dinas masih dihadapkan pada beberapa kendala. Keterbatasan sarana ini akan menyebabkan terhambatnya kinerja kalangan birokrasi dan administrator pendidikan. Kondisi ini diperkuat dengan pemberlakuan KBK yang merupakan barang baru di jajaran pelaku dan administrasi pendidikan.

3.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik benang merah yang bertalian dengan kinerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula dalam pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu kinerja guru bahwa (1) sudah ada upaya untuk memperbaiki mutu (kualitas proses dan produk) pendidikan di kecamatan Tejakula, (2) staf Cabang Dinas Pendidikan (penilik, ketua gugus, dan kepala sekolah) belum memiliki pemahaman yang komprehensif dan objektif tentang makna dari otonomi pendidikan dan manajemen Berbasis sekolah dalam rangka pelaksanaan KBK, (3) guru memandang bahwa kinerja Kepala Cabang Dinas telah mengacu pada penerapan manajemen Berbasis sekolah, namun masih perlu ditingkatkan, khususnya yang bertalian dengan perlindungan dan pemberdayaan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan Kurikulum di level sekolah, dan (4) upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang sekolah dasar di kecamatan Tejakula masih memerlukan berbagai terobosan, sehingga peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Fakta ini sejalan dengan apa yang dikedepankan oleh Marzurek (1994) bahwa di era global, pelibatan segenap komponen masyarakat, khususnya yang bernuansa *local genius* sangat substansial, sehingga dampak dari globalisasi tidak menjadikan sebuah bangsa atau *nation* kehilangan jati diri dan identitasnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, pendidikan sebagai media pembangunan dan pembentukan karakter bangsa harus mampu memainkan perannya melalui pembekalan

nilai-nilai kedirian dan kebangsaan secara tepat dan komprehensif, sehingga produk yang dihasilkannya benar-benar mampu menjadikan sebuah bangsa mencapai kehidupan yang lebih baik.

Peranan dan diversifikasi kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh berbagai level birokrasi dalam konstalasi pembangunan pendidikan di Indonesia harus mampu menjawab berbagai kebutuhan dan permasalahan real di masyarakat, sehingga tidak terjadi akumulasi permasalahan sebagai dampak dari manajemen yang kontraproduktif. Untuk mencapai kondisi tersebut, Jalal dan Supriadi (2001) mengajukan beberapa rekomendasi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan dan kinerja guru pada tingkat sekolah dasar, yaitu (1) pemberian beban kerja tambahan kepada guru sekolah dasar harus diimbangi dengan peningkatan *salary* secara signifikan, (2) garis koordinasi dan komando pendidikan di tingkat sekolah dasar harus diarahkan pada pemberian kewenangan dan keotonomian guru dan sekolah, sehingga manajemen Berbasis sekolah yang diwacanakan dapat terlaksana secara optimal, (3) otonomi pendidikan dengan sentral pemerintah kabupaten/kota, harus diiringi dengan pengembangan sistem dan model pemberdayaan guru yang Berbasis kinerja, sehingga secara perlahan dapat menghindarkan dunia pendidikan dari “intervensi politik” seperti yang terjadi selama ini, dan (4) pengelolaan guru sekolah dasar hendaknya mengacu pada *demand and supply* sehingga rekrutmen, pengelolaan, dan pengajiannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kinerja guru di masing-masing daerah.

Indikator kinerja sebagai salah satu fokus penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi dan kualitas kinerja para pelaku pendidikan di wilayah kecamatan Tejakula. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, untuk menjadikan mutu pendidikan di wilayah kecamatan Tejakula menjadi lebih baik, masih diperlukan berberapa upaya secara sistemik, sehingga upaya pencapaian mutu pendidikan dan kinerja guru sekolah dasar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik di masing-masing daerah kabupaten/kota. Hal ni sejalan dengan apa yang dikedepankan oleh Tilaar (2001), bahwa upaya reformasi sistem pendidikan nasional, harus dimulai dari level terbawah, yaitu perbaikan pada moral kinerja guru dan manajemen sistem di tingkat kabupaten/kota, sebagai sentral dari pelaksanaan otonomi pendidikan.

4. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin bertalian dengan rumusan masalah yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini, yaitu (1) dilihat dari profil kinerja Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula, ternyata secara adminisitrasi dan birokrasi pendidikan masih mengalami beberapa masalah, terutama menyangkut kinerja pelaku, pengembang, dan administrator pendidikan; (2) Kepala sekolah dasar di lingkungan

kerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula ternyata telah mampu melakukan perubahan cara pandang dan sikap menyongsong pemberlakuan KBK dan otonomi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kesempatan yang optimal kepada guru di sekolahnya untuk mengembangkan dan meningkatkan karir profesinya setiap saat secara optimal; (3) di mata guru, kinerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula memiliki nilai positif. Hal ini dapat dilihat dari kinerja yang telah dilakukannya menurut perspektif guru. Kebanyakan guru menyatakan bahwa kinerjanya cukup lumayan dalam kaitannya dengan pemberlakuan otonomi dan KBK sebagai bentuk inovasi pendidikan; dan (4) kendala utama yang dihadapi oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan kecamatan Tejakula adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta masih belum mapannya kualitas sumber daya pendidikan di wilayahnya. Hal ini cukup mengganggu kinerja dan pencapaian standar mutu pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diformulasikan rekomendasi sebagai berikut, bahwa untuk meningkatkan kinerja guru, mutu pendidikan, dan pemberlakuan KBK serta otonomi pendidikan, diperlukan seperangkat upaya secara simultan dan kolaboratif antara pengambil kebijakan, administrator, pengembang, dan pelaku pendidikan, sehingga terdapat satu bahasa untuk melakukan dan melaksanakan inovasi pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Hal ini khususnya pada level kabupaten sebagai sentral pemberlakuan otonomi pendidikan. Di sisi lain, upaya-upaya inovasi pengorganisasian dan peningkatan kinerja guru sebagai pengembang dan pelaksana Kurikulum hendaknya melibatkan berbagai komponen pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Buleleng, termasuk kalangan *stake holders* dan dunia usaha. Hal ini penting dilakukan, mengingat bahwa di era otonomi dan KBK saat ini, pelibatan *stake holder* dan dunia usaha merupakan sebuah keharusan dalam rangka peningkatan tanggungjawab moral-ekonomi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Dikdasmen RI. 2003. *Program Peningkatan Kualitas Kenenagaan Pendidikan Dasar*. Jakarta : Depdiknas RI.
- Hasan, H. 2003. Polemik Seputar Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Personal Paper*). Bahan Kajian POKJA SISDIKNAS DPR. Jakarta: DPR RI.
- Hasan, H. 2002. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah Kurikulum yang Berhuk pada Kepentingan Belajar Peserta Didik. *Bahan Kajian POKJA SISDIKNAS DPR*. Jakarta: DPR RI.
- Lasmawan, W. 2002. Pengembangan Model Pendidikan yang Berbasis Masyarakat : Alternatif Pilihan Bagi Daerah kabupaten Menyongsong Pemberlakuan Otonomi

Pendidikan. *Makalah* Disampaikan dalam Seminar Nasional di PPS UPI Bandung. Bandung : PPS UPI Bandung.

Lasmawan, W. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi: Sisi Lain Inovasi yang Tak Terstruktur dalam Pembangunan Pendidikan Nasional. *Makalah* Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Implementasi KBK di Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Bangli Tanggal 30 Mei 2003.

Marzurek, K. (et.al). 1994. *Educational in A Global Society*. USA: McMillan, Co.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000.

NCSS 2003. The desk evaluation of teacher's performance. USA: NCSS Bulletin.

Puskur. 2003. *Kurikulum Berbasis Kelas*. Available at: [http://www: info@puskur.or.id, blitbang@cbn.net.id](http://www.info@puskur.or.id,blitbang@cbn.net.id)

Puskur. 2003. *Pengelolaan Kurikulum Berbasis Kelas*. Available at: [http://www: info@puskur.or.id, blitbang@cbn.net.id](http://www: info@puskur.or.id,blitbang@cbn.net.id)

Tilaar, H.A.R. 2001. *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Menyongsong Indonesia Baru*. Jakarta: PT. Grasindo.

UNESCO. 1996. *What Makes a Good Teacher? Children Speak Their Minds*. Paris.

UNESCO. 1998. *World Education Reports: Teachers and Teaching in a Changing World*. Paris.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Wahab, A. 1999. *Otonomi Daerah dan Problematikanya*. Bandung: PPS UPI Bandung.

WEF. 1999. *Global Competitiveness Report 1999*.

World Bank. 1998. *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery. Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office*.

World Bank. 1989a. Indonesia: Strengthening the Quality of Teacher Education. *Draft Technical Paper, Asia Region*.